



LAPORAN
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN URUSAN PERSANDIAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Udayana No. 14 - Mataram, Kode Pos 83122

Telepon. (0370) 644264, Faks (0370) 7509831

E-mail : kominfotik@ntbprov.go.id Website : diskominfotik.ntbprov.go.id

Nomor : 046 / 50 / 4 / KOMINFOTIK
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan
Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
T.A 2020

Mataram, 30 September 2021

Yth. 1. Kepala Badan Sandi dan Siber Negara
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat

di -

Tempat

Dengan hormat,

Merujuk Surat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor: T.0104/BSSN/D2/PP/0101.02/03/2020 Tanggal 9 Agustus 2021 tentang Laporan Hasil Pemantauan serta Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemda T.A 2020, berikut disampaikan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

✓ Telah ditandatangani secara elektronik oleh 2
Kepala Dinas


Dr. Najamuddin Ammy, S.Sos., MH
NIP.19750112199603 1 006

Tembusan kepada Yang Terhormat:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Inspektur Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Arsip.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Gubernur NTB No. 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur NTB No. 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Urusan Persandian dilaksanakan oleh Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Tata Kelola Persandian, Keamanan Informasi serta Sistem Pengelolaan Komunikasi Intra Pemerintah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

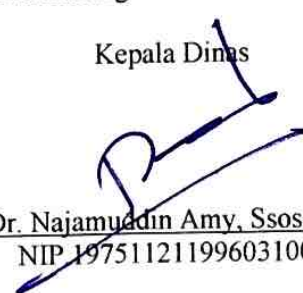
1. Penyusunan kebijakan strategis di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
2. Pelaksanaan kebijakan strategis di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dan pembinaan di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
5. Perjanjian kerjasama penerbitan sertifikat elektronik dengan BSrE.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi masih memiliki beberapa kendala, antara lain masih tidak memadainya sumber daya, baik sumber daya manusia dan infrastruktur. Untuk itu, telah dilakukan upaya identifikasi permasalahan dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang kami miliki.

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi senantiasa berikhtiar dan berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan optimal, dalam kerangka pencapaian tujuan penyelenggaraan Urusan Persandian di NTB.

Telah ditandatangani secara elektronik oleh

Kepala Dinas


Dr. Najamuddin Amy, Ssos, MM
NIP. 197511211996031006

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Hukum	1
B. Tujuan	2
BAB II HASIL EVALUASI URUSAN	
PERSANDIAN TAHUN ANGGARAN	
2019	
A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja Dan Kegiatan.....	3
B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja Dan Kegiatan.....	6
C. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Masalah	9
BAB III PROGRAM KERJA TAHUN	
2020	
A. Seksi Tata Kelola Persandian.....	12
B. Seksi Keamanan Informasi	12
C. Seksi Sistem Pengelolaan Komunikasi Intra Pemerintah.....	13
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	14
B. Saran.....	14
 LAMPIRAN	
LAMPIRAN I DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI	
LAMPIRAN II DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA	
LAMPIRAN III DAFTAR PERALATAN SANDI	
LAMPIRAN IV DAFTAR KUNCI SISTEM SANDI	
LAMPIRAN V DAFTAR ALAT PENDUKUNG UTAMA	
LAMPIRAN VI DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK	
LAMPIRAN VII DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN	
LAMPIRAN VIII DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI	
LAMPIRAN IX DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI	
LAMPIRAN X DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE	
LAMPIRAN XI KELENGKAPAN SARANA KERJA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 277)
7. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pemerintahan
8. Peraturan Gubernur NTB Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Peraturan Gubernur NTB Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

A. Tujuan

Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Provinsi NTB bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran pelaksanaan penyelenggaraan persandian Tahun Anggaran 2020;
2. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan Persandian;

BAB II

HASIL EVALUASI PROGRAM URUSAN PERSANDIAN TAHUN ANGGARAN 2020

A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja Dan Kegiatan

Pada tahun 2020, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat guna mendukung tercapainya 1 (satu) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja, kondisi perubahan realisasi kegiatan terhadap target kinerja dipengaruhi oleh situasi Pandemi Covid 19 yang beberapa kali diadakan *refocusing* anggaran dikarenakan kebutuhan rasionalisasi anggaran guna penanganan bencana non alam yang saat itu tengah menjadi prioritas Pemerintah Provinsi NTB.

Kegiatan pembinaan evaluasi dan pelaksanaan keamanan informasi memiliki 10 dokumen kegiatan pada APBD murni terealisasi menjadi 3 dokumen kegiatan pada APBD perubahan, kegiatan yang lainnya ialah penguatan tata kelola persandian dengan jumlah kegiatan 1 dokumen kegiatan saja pada APBD Murni sebesar kebutuhan penanganan tetap di realisasikan 1 dokumen kegiatan di APBD Perubahan, kegiatan Pengembangan SDM Persandian dengan jumlah kegiatan pengembangan SDM yang semula mengirimkan sebanyak 5 orang personil menjadi 0 dikarenakan situasi Pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan dilaksanakan kegiatan sehingga tidak dilakukan pengiriman personil untuk pengembangan SDM Persandian tetapi dengan sisa anggaran pada APBD Perubahan dilakukan untuk pembayaran honorarium 5 orang tenaga pendukung teknis administrasi persandian, kegiatan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah ditetapkan target semula sebanyak 4 OPD menjadi 0 OPD atas beberapa pertimbangan pada pembahasan anggaran diberikan tambahan anggaran yang dilaksanakan berikutnya dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan Monev Koordinasi teknis 7 Kabupaten/Kota se-NTB, sedangkan kegiatan peningkatan kapasitas teknologi pengamanan informasi yang semula ditetapkan target 20% menjadi 0 atau kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan, deskripsi anggaran sesuai tabel 2.1 dibawah ini.

Melalui dukungan dana APBD Provinsi NTB Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 59/DPA/TAPD/2020 yang disahkan tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp.906.343.207. (Sembilan Ratus Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah), yang pada waktu selanjutnya terjadi *refocussing* anggraan yang disebabkan terjadinya bencana non alam pandemi covid-19, anggaran menjadi Rp. 318.652.100 (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) dan dilakukan perubahan berdasar surat keputusan nomor : 134/DPPA/TAPD/2020 yang telah disahkan tanggal 06 Oktober 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp.340.498.500 (Tiga Ratus Empat puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Tabel 2.1. Realisasi Kegiatan

No.	Ruang Lingkup	Jumlah Kegiatan (APBD murni)	Jumlah Kegiatan (APBD Perubahan	Realisasi Kegiatan	% Capaian
1.	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Keamanan Informasi.	10 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100
2.	Penguatan Tatakelola Persandian dan Pengamanan Informasi.	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100
3.	Pengembangan SDM Persandian.	5 Orang	5 orang	5 orang	100
4.	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah. - Otentikasi OPD dengan pengamanan Informasi yang mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. - Monev Koordinasi Teknis Kabupaten/Kota se NTB	4 OPD	0 OPD, 10 Kabupaten/Kota	0 OPD, 7 Kabupaten/Kota	70.88
5.	Peningkatan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi	20%	0%	0%	0
Jumlah		21 Kegiatan	19 Kegiatan	18 Kegiatan	94.73

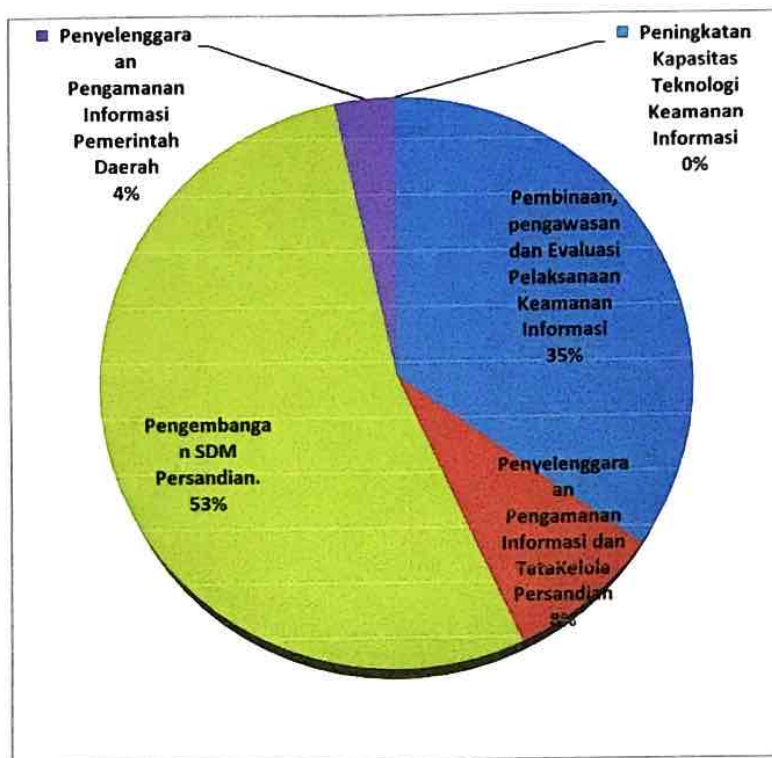
Realisasi anggaran kegiatan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi di tahun 2019, adalah sebesar 96,41 % atau sebesar Rp. 367.403.354, - (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah). Anggaran yang tidak terserap hanya sebesar Rp. 13.680.926 (Tiga Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 3.59 %. Untuk realisasi fisik, seluruh kegiatan mencapai 100%. Adapun realisasi anggaran kegiatan pada bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada tahun 2020 dijabarkan dalam tabel 2.2 dibawah berikut ini.

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Kegiatan Bidang Persandian Untuk Keamanan Informasi Tahun 2020

No.	Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran Perubahan	Capaian Anggaran Perubahan
1.	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Keamanan Informasi	213.040.000	134.185.000	122.380.000	91,20%
2.	Penyelenggara an Pengamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian	152.275.000	2.900.0000	2.900.0000	100%
3.	Pengembangan SDM Persandian; - Dukungan pembiayaan Tenaga Administrasi Pendukung Teknis Persandian dan Keamanan Informasi	236.350.000	186.417.500	186.417.500	100%
4.	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah - Monitoring dan Evaluasi ke seluruh Kabupaten/Kota se NTB dalam rangka koordinasi Teknis Keamanan Informasi	145.620.000	16.999.600	12.049.600	70,88%
5.	Peningkatan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi.	159.058.207	0	0	0
Jumlah		1.866.686.414	340.502.100	323.847.100	95,08%

Realisasi anggaran kegiatan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi di tahun 2020 adalah sebesar 95,08 % atau dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 323.747.100 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah). Anggaran yang tidak terserap adalah sebesar Rp. 4.950.000 (Empat Juta Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 4,92 %. Untuk realisasi fisik, seluruh kegiatan mencapai 94,73%.

Diagram 2.1. Perbandingan Alokasi Anggaran Persandian Berdasarkan DPA Perubahan T.A. 2020



Pada diagram diatas, dapat dilihat bahwa alokasi keseluruhan anggaran sebesar Rp 323.847.100,- alokasi terbesar dialokasikan pada kegiatan pengembangan SDM Persandian yang berada pada seksi Tata Kelola Persandian dengan alokasi sebesar 53% melalui kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan SDM Persandian, 35% melalui kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Keamanan Informasi, 8% merupakan kegiatan yang mensuport Penyelenggaraan Pengamanan Informasi dan Tatakelola Persandian, 4% adalah alokasi anggaran terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi dan tata Kelola Persandian serta Peningkatan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi tidak mengalami alokasi kegiatan dari realisasi anggaran perubahan.

B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

Adapun rincian pelaksanaan kegiatan pada pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi memiliki ringkasan tugas diantaranya sebagai berikut:

1. Seksi Tata Kelola Persandian

Pada tahun 2020, Seksi Tata Kelola Persandian melalui Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian, melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian. Berikut adalah Tabel 2.4 yang menunjukkan posisi anggarannya.

Tabel 2.4 Program Kerja Seksi Tata Kelola Persandian Tahun 2020

No.	Program Kerja	Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (Rp)	Capaian Hasil
1.	Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian	189.317.500	189.317.500	100 %

Seksi Tata Kelola Persandian pada tahun 2020 telah melaksanakan tugas sesuai dengan sasaran dan target kegiatan yang tertuang dalam DPA tahun 2020 dalam pendukung rencana kerja program kegiatan / Bidang Persandian dan Keamanan Informasi secara keseluruhan dapat di katakan berhasil meskipun dilaksanakan tidak mencapai 100%, yakni sebesar 94,73% begitu juga realisasi keuangan sebesar 95,08%.

Dalam mendukung pencapaian Indikator kinerja Dinas Kominfotik, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi melalui seksi Tata Kelola Persandian telah melakukan kegiatan penilaian tingkat maturitas penanganan insiden keamanan informasi yang dilaksanakan oleh BSSN, untuk tahun 2020 nilai maturitas penanganan insiden (TMPI) yang telah dilakukan oleh BSSN terhadap Dinas Kominfotik Provinsi NTB telah mencapai level III, melebihi target yang sebelumnya telah ditentukan tahun 2020, yakni level II.

Disamping itu pada tahun 2020 juga telah dilaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Direktorat Proteksi dengan metode desktop/ offsite audit yang dilaksanakan untuk menilai secara terukur terhadap pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pada urusan Persandian yang terdapat pada 3 area :

- a. Area Tata Kelola dan Kerangka Kerja
- b. Area Pengelolaan Sumberdaya Persandian; dan
- c. Area Operasional Persandian

Hal ini dilakukan dalam rangka pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan urusan persandian Pemerintah Provinsi NTB yang juga telah dicapai level III atau dalam skala status terdefinisi.

2. Seksi Keamanan Informasi

Program kegiatan seksi keamanan informasi yang tertuang dalam DPA tahun 2020 secara umum telah mendukung rencana kerja program dan kegiatan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi serta Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi NTB Tahun 2020. Hal ini terlihat dari capaian realisasi kegiatan 100% dan keuangan sebesar 70,88% dari uraian diatas dapat terlihat bahwa realisasi keuangan tidak berbanding lurus dengan realisasi kinerja, hal ini disebabkan oleh adanya kesalahan sistem yaitu terjadinya dissinkronisasi antara SIMDA Program dengan SIMDA Keuangan. Berikut adalah Tabel 2.5 yang menunjukkan posisi anggarannya.

Tabel 2.5 Program Kerja Seksi Keamanan Informasi Tahun 2020

No.	Program Kerja	Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (Rp)	Capaian Hasil
1.	Optimalisasi Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian	16.999.600	12.049.600	70.88%

Dalam pelaksanaan kegiatan Keamanan Informasi Bidang Persandian dan Keamanan Informasi melalui seksi Keamanan Informasi bekerjasama dengan Bidang TIK telah memfasilitasi pendaftaran Tanda Tangan Elektronik Para Pejabat Lingkup Pemerintah Provinsi NTB sebanyak 26 OPD yang diusahakan tahun 2020 bisa dipergunakan oleh pejabat yang bersangkutan. Disamping itu telah dilakukan koordinasi dengan bidang PTIK dalam pemantauan serangan siber dan ditemukan sebanyak 8 (delapan) insiden serangan.

Selain melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang tertuang dalam DPA, seksi keamanan informasi juga melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang tertuang dalam DPA, Seksi Keamanan Informasi juga melaksanakan kegiatan diluar dari perencanaan yaitu kegiatan yang bekerjasama dengan BSSN, antara lain Launching NTB Prov_CSIRT, pelaksanaan kontra penginderaan pada ruang pimpinan daerah dan memfasilitasi pelaksanaan IT Security Assesment pada satu aplikasi Web yang dikelola BKD <https://csirt.ntbprov.go.id>; web <https://ntbprov.go.id>; web <https://care.ntbprov.go.id>; Web Simadu BKD.

3. Seksi Sistem Pengelolaan Komunikasi Intra Pemerintah

Seksi Sistem Pengelolaan Komunikasi Intra Pemerintah di tahun 2020 menjalankan Program sesuai dengan rencana kegiatan yang tertuang pada DPA Tahun 2020, secara umum seksi Sistem Pengelolaan Komunikasi Intra Pemerintah telah melaksanakan program/ kegiatan yang mendukung rencana kerja program dan kegiatan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, sebagaimana hasil capaian realisasi fisik kegiatan dan keuangan yang tidak berbanding lurus, hal ini disebabkan karena ketidaksesuaian antara penyusunan SK Tim NTB Care dengan dana yang dianggarkan. Berikut adalah tabel 2.6 yang menunjukkan posisi anggarannya.

**Tabel 2.6 Program Seksi Sistem Pengelolaan Komunikasi Intra Pemerintah
Tahun 2020.**

<i>No.</i>	<i>Program Kerja</i>	<i>Anggaran (Rp)</i>	<i>Serapan Anggaran (Rp)</i>	<i>Capaian Hasil</i>
1.	<i>Penguatan Kemitraan Telekomunikasi dan Pengendalian Telekomunikasi</i>	134.185.000	122.380.000	91,20 %

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi Sistem Pengelolaan Komunikasi Intra Pemerintah antara lain :

- a. Memantau pengaduan masyarakat yang masuk pada aplikasi NTB Care yang selanjutnya diteruskan kepada admin OPD terkait untuk mendapatkan tanggapan dan penyelesaian.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam urusan permasalahan daerah blankspot dan lemah sinyal, dari hasil koordinasi di NTB tercatat sebanyak 44 titik lokasi blankspot dan 53 titik lokasi yang terdapat lemah sinyal yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.
- c. Melayani pengiriman undangan/pengumuman melalui SMS Centre yang selanjutnya dikirimkan ke seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB yaitu sebanyak 51 buah.
- d. Mendukung kelancaran komunikasi, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi melalui sistem Pengelolaan Komunikasi Intra Pemerintah telah melakukan pemeliharaan 1 unit Repeater yang berlokasi di Dusun Awang Madya Desa Gili Madya kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat

4. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

Kegiatan pembinaan dan pengawasan ke pemerintah kabupaten/kota, pada tahun 2020 hanya dilaksanakan pada kegiatan koordinasi dengan 10 Kabupaten/Kota dalam hal penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Tabel 2.7. Tabel Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah
Seksi Tata Kelola Persandian		
1.	a. Diperlukan peningkatan kapasitas skill SDM yang berkualifikasi ahli sandi/diklat teknis lainnya untuk penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi secara optimal;	Untuk tahun 2021, telah disiapkan pos anggaran untuk mengirimkan 5 (lima) personel mengikuti Diklat Sandi yang diselenggarakan BSSN;
	b. Dukungan b e s a r a n anggaran yang belum memadai untuk pelaksanaan kegiatan tata kelola persandian yang bersifat teknis, seperti sosialisasi/bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi SDM sandi provinsi dan kabupaten/kota di NTB;	Untuk anggaran tahun 2021, telah menyediakan pos anggaran untuk pelaksanaan kegiatan teknis tata kelola persandian untuk meningkatkan kompetensi SDM sandi provinsi dan kabupaten/kota di NTB;
	c. Pemanfaatan email Sanapati belum optimal karena sistem email Sanapati belum juga terpasang di seluruh perangkat daerah Provinsi NTB. Hal ini menyebabkan distribusi email ke perangkat daerah masih dilakukan secara manual.	Pada Bulan Oktober 2019, telah bersurat ke BSSN terkait pemanfaatan email Sanapati pada seluruh perangkat daerah Provinsi NTB (penginstalan sistem email pada perangkat daerah dan dilakukannya sosialisasi penggunaannya);
Seksi Keamanan Informasi		
	a. Implementasi Sertifikat digital belum optimal karena kekurangan SDM IT untuk teknis pembuatan aplikasi sesuai standar BSR.E. Tenaga IT untuk penerapan sertifikat digital adalah fungsional pranata computer pada Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi belum berhasil dilaksanakan mengingat terjadi refocusing anggaran;	Telah berkoordinasi dengan unsur pimpinan untuk mendapatkan tambahan personel IT agar dapat mempercepat proses penerapan tanda tangan digital di tahun 2021;
	b. Sarana infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dan implementasi sertifikat digital belum optimal mengingat terjadi refocusing anggaran;	Telah berkoordinasi dengan unsur pimpinan terkait alokasi dana untuk pengadaan server dan perangkat IT sesuai standar kebutuhan untuk melaksanakan pengamanan informasi yang lebih baik dan sertifikat elektronik di tahun 2021.
	c. Belum optimalnya pemahaman stakeholder (unsur pimpinan perangkat daerah Provinsi NTB) terkait implementasi sertifikat elektronik;	Melakukan sosialisasi dan penerapan sertifikat elektronik kepada stakeholder (unsur pimpinan perangkat daerah Provinsi NTB) di tahun 2020;
	d. Belum optimalnya pemahaman unsur pimpinan perangkat daerah Provinsi NTB terkait pemanfaatan sarana komunikasi sandi selain itu mengingat terjadi refocusing anggaran;.	Melakukan sosialisasi dan penerapan pemanfaatan sarana komunikasi sandi kepada unsur pimpinan perangkat daerah Provinsi NTB di tahun 2021;

Seksi Sistem Pengelolaan Komunikasi Intra Pemerintah		
	<p>a. Pembangunan Infrastruktur JKIP (Jaring Komunikasi Intra Pemerintah) melalui pemanfaatan Radio Komunikasi dengan pemerintah kab/kota se NTB, belum dapat dilaksanakan karena minimnya anggaran kab/kota di NTB yang saat ini situasinya diprioritaskan dalam rangka penanganan pandemi.</p>	<p>Berkoordinasi lebih intens dengan kab/kota terkait pola pembangunan perencanaan penerapan Jaring Komunikasi Intra Pemerintah melalui Radio Komunikasi Masyarakat dengan melakukan komunikasi daring atau perjalanan dinas ke kab/kota.</p>
	<p>penyelenggaraan urusan Persandian.</p>	
	<p>b. Alat komunikasi intra pemerintah (Handy Talky dan Repeater) belum beroperasi optimal karena penganggaran alat ini dialihkan pada saat refocusing anggaran guna dialokasikan untuk kebutuhan penanganan pandemi.</p>	<p>Pada tahun 2021, telah disediakan pos anggaran untuk pengadaan 3 buah repeater beserta biaya pemeliharaannya, tetapi batal diadakan karena dilakukannya refocusing anggaran terkait Covid-19. Fungsinya diasumsikan telah digantikan dengan pemanfaatan fungsi fasilitas email Sanapati maupun Smartphone</p>
	<p>c. Perangkat repeater yang dimiliki sudah tidak mampu beroperasi optimal karena tidak sesuai dengan kemajuan TIK saat ini tetapi batal dilakukan pengadaanya dikarenakan situasi Pandemi 19 sehingga anggarannya dialihkan dalam refocusing anggaran Pandemi Covid 19.</p>	<p>Pada tahun 2021, telah disediakan pos anggaran untuk pengadaan 1 buah repeater beserta biaya pemeliharaannya tetapi tidak jadi dilaksanakan karenanya fungsinya otomatis menjadi tidak dibutuhkan lagi namun digantikan dengan optimalisasi pemanfaatan email Sanapati antar Wilayah.</p>
	<p>d. Jumlah peralatan komunikasi (Handy Talky) terbatas, sehingga tidak dapat dilakukan pengurusan ijin penggunaan frekuensi radio (ijin dapat diberikan jika memiliki minimal 40 buah HT);</p>	<p>Pada tahun 2020, telah direncanakan pengadaan 40 unit Handy Talky;</p>

BAB III

PROGRAM KERJA TAHUN 2021

Pada tahun 2021, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi hanya memiliki satu program kerja yaitu Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian yang dijalankan pada semua seksi dengan kegiatan yang berbeda. Untuk tahun 2021, dukungan anggaran sudah meningkat menjadi Rp. 409.000.000,- (Empat Ratus SembilanJuta Rupiah).

A. Seksi Tata Kelola Persandian

Seksi Tata Kelola Persandian melaksanakan dua kegiatan yaitu kegiatan Penyusunan Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi sebesar Rp. 39.460.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi. Rp. 181.740.000,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Tabel 3.1 Kegiatan Seksi Tata Kelola Persandian

No.	Kegiatan	Anggaran	Waktu Pelaksanaan
1.	PenetapanKebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	Rp. 39.460.000,-	Akan menyesuaikan
2.	Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 181.740.000,-	Akan menyesuaikan

B. Seksi Keamanan Informasi

Seksi Keamanan Informasi melaksanakan dua kegiatan yaitu kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 77.500.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Rp.22.500.000,- (Dua puluh dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Tabel 3.2 Kegiatan Seksi Keamanan Informasi

No.	Program Kerja	Anggaran	aktu Pelaksanaan
1.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.	Rp. 77.500.000,-	akan Menyesuaikan
2.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 22500.000	akan menyesuaikan

i. Seksi Sistem Pengelolaan Komunikasi Intra Pemerintah

Program Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi pada Seksi Sistem Pengelolaan Komunikasi Intra Pemerintah dilaksanakan dengan kegiatan Pembinaan, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 87.800.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Tabel 3. Kegiatan Seksi Sistem Pengelolaan Komunikasi Intra Pemerintah

No.	Program Kerja	Anggaran	Waktu Pelaksanaan
1.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Rp. 87.800.000,-	akan menyesuaikan

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada tahun 2020, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan Penyelenggaraan persandian dengan capaian hasil realisasi fisik 94,73 %. dan realisasi keuangan sebesar 95,08%.
2. Umumnya permasalahan yang dihadapi secara garis besar adalah situasi pandemi yang sama dengan permasalahan yang berada di daerah lainnya yang telah menggerus ketersediaan anggaran kegiatan karena dilakukannya refocusing atau rasionalisasi anggaran kegiatan untuk dialokasikan pada penanganan pandemi sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan.

B. Saran

i. Diharapkan kepada BSSN :

1. Dapat memberikan sinkronisasi bimbingan dan arahan secara berkelanjutan terkait program dan kegiatan penyelenggaraan urusan persandian;
2. Secara terjadwal mengadakan bimbingan teknis keamanan siber di Nusa Tenggara Barat pada yang dapat meningkatkan kapasitas skill dan pengetahuan personil pengelola keamanan siber.
3. Dapat memberikan dukungan fasilitasi terhadap kebutuhan peralatan baik peralatan baru maupun layanan reparasi material sandi di daerah.

ii. Untuk Pemerintah Provinsi NTB

1. Memberikan dukungan berupa alokasi anggaran yang memadai untuk bidang Persandian dan Keamanan Informasi.
2. Meningkatkan SDM baik pelaksana ASN dan Non ASN pengelola Persandian dan Keamanan Informasi dengan mengikuti diklat/bimtek/workshop peningkatan kompetensi dan pengetahuan di bidang Persandian dan Keamanan Informasi.
3. Mendorong Penguatan sarana dan prasarana untuk keamanan siber dalam rangka memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI
DI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	Judul Dokumen Kebijakan/Prosedur Keamanan Informasi	Deskripsi Singkat	Tahun Terbit	Revisi ke - /Tahun
1.	Peraturan Gubernur No. 59 Tahun 2017	Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.	Tahun 2017	
2.	Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018.	Tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik.	Tahun 2018	-
3.	Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pergub ini mengubah struktur Bidang Persandian dan LPSE menjadi Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.	Tahun 2019	-

Mataram, 30 September 2021

Mengetahui,

✓ Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik


Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, M.M.
NIP. 19750112199603 1 006

LAMPIRAN II

**DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA PELAKSANAAN URUSAN PERSANDIAN
DI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan/TMT	Pendidikan		Pelatihan Persandian/ Keamanan Informasi		Sertifikasi di Bidang Keamanan Informasi		Penghargaan di Bidang Persandian/ Keamanan Informasi		Tunjangan Pengamanan Persandian		Tugas Lain di Luar Urusan Persandian
					Jenjang	Tmn Lulus	Nama Pelatih- an	Tmn	Nama Sertifika- si	Tmn	Nama Penghar- gaan	Tmn	Dapat	Tidak Dapat	
1.	I Gede Putu Anyadi, S.Sos, M.H.	196703201989031003	Pembina Utama Muda / IV/c	Kepala Dinas / 11 Maret 2019	S2 Ilmu Hukum	2010	-	-	-	-	-	-	Dapat		-
2.	Widjati Tjatur S., S.H., MM>	196612311991031108	Pembina Tingkat I /IV/b	Kepala Bidang /11 Maret 2020	S2 Magister Manajem an	2000	-	-	-	-	-	-	Dapat		-
3.	Drs. I Made Putu Kusuma Wijaya	196211251992031005	Penata Tingkat I /III/d	Kasi Keamanan Informasi/ 11 Maret 2019	S1 Ilmu Ekonomi	1988	-	-	-	-	-	-	Dapat		-
4.	Agus Supriharto, S.Kom	197001031996031004	Penata Tingkat I /III/d	Kasi Sistem Pengelolaan Komunikasi Intra Pemerintah/ 11 Maret 2020	S1 Manajemen Informatika	1990	-	-	-	-	-	-	Dapat		-
5.	L. Ariel Gunawan, SE, M.Si	197610212010011002			S2	2004		2018	-	-	-	-	Dapat		

			Penata Tingkat I / III / d	Kasi Tata Kelola Persandian / 11 Maret 2019	Ekonomi Pembangunan	Diklat Sandiman	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
6.	Sophia Adeline, S. Sos	197701112005012011	Penata Tingkat I / III / d	Pelaksana / 11 Maret 2019	S1 Ilmu Komunikasi	2001	-	-	-	-	-	-	Dapat	Tidak ada
7.	I Made Merta Wijaya, S.H	197212311994031024	Penata Tingkat I / III / c	Pelaksana / 11 Maret 2019	S1 Ilmu Hukum	2006	-	-	-	-	-	-	Dapat	Tidak ada
8.	Yayuk Sri Mahyuniasih	196606291989032010	Penata Muda Tingkat I / III / b	Pelaksana / 11 Maret 2019	SMA	1985	Diklat Sandiman Dasar	2018	-	-	-	-	Dapat	Tidak ada
9.	R. Ronald Omy Yulyantho, ST, MT	198307172009011008	Penata Muda Tingkat I / III / b	Fungsional Pranata Komputer Pertama	S2 Telekomunikasi	2018	-	-	-	-	-	-	Dapat	-
10.	Putra Handayani, S.H	-	-	PTT	S1 Ilmu Hukum	2005	-	-	-	-	-	-	Dapat	-
12.	Listya Ayuningsih Surya Pratiwi, S.Kom.	-	-	PTT	S1 Teknik Informatika	2018	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Ida Made Wira Adnyana, S.H	-	-	PTT	S1 Hukum	2018	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Yosalat Parulian, S. Kom	-	-	PTT	S1 Sistem Informasi	2020	-	-	-	-	-	-	-	-

10.	Putra Handayani, S.H	-	-	PTT	S1 Ilmu Hukum	2005	-	-	-	-	-	-	-	Dapat	-
12.	Listya Ayuningsih Surya Prathwi, S.Kom.	-	-	PTT	S1 Teknik Informatika	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Ida Made Wira Adnyana, S.H	-	-	PTT	S1 Hukum	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Fitrah Zaiman S.Pd.I			PPT	S1 Pendidikan Agama Islam	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mataram, 30 September 2021
Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik


Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, M.M.
NIP. 19750112199603 1 006

LAMPIRAN III

**DAFTAR PERALATAN SANDI
DI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

No	Nama Palsan	Jumlah	Nomor Seri	NUP	Posisi	Pengadaan		BAST		Kondisi (B/R)	Kesiapan Ops	Penggunaan (AG/TG)
						Instansi	Tahun	Nomor	Tanggal			
1.	KRIPTOSOFT PRO	1 UNIT	3319	14151	Kasa Diskominfoitk	BSSN	2010					
2.	SECURE VPN ENCRYPTION	1 UNIT	11402S 28739B	15416	Kasa Diskominfoitk	BSSN	2011	02.01/08/2019	28 Agustus 2019			
3.	LAPTOP FUJITSU	1 UNIT	515170010R1Y002 59	641	Kasa Diskominfoitk	Built up	2011	02.01/08/2019	28 Agustus 2019	Baik		
4.	SECURE ANALOG RADIO ENCRYPTION (ARES)	1 UNIT	H181 D00557 H181 D00559 H181 D00560 H181 D00541 H181 D00545 H181 D00 542 H181 D00 544	26337 26338 26339 26340 26341 26342 26343	31 UNIT DISERAH TERIMAKAN KEMBALI KE BSSN MELALUI BAST Nomor 020/105/4/Kominfoitk, 29 Oktober 2019.	BSSN	2013	02.01/08/2019	28 Agustus 2019	Baik	SO	TG

			H181 D00 643 H181 D00611 H181 D00612 H181 D00 610 H181 D00606 H181 D00609 H181 D00607 H181 D00515 H181 D00 520 H181 D00514 H181 D00505 H181 D00503 H181 D00502 H181 D00510 H181 D00509 H181 D00510 H181 D00509 H181 D00506 H181 D00506 H181 D00507 H181 D00508 H181 D00791 H181 D00793 H181 D00547 H181 D00548 H181 D00550 H181 D00549 H181 D00944	26344 26345 26346 26347 26348 26349 26350 26351 26352 26353 26354 26355 26356 26357 26358 26359 26360 26361 26362 26363 26364 26365 26366 26367 26368 26369 26370								
5.	KRIPTOPHONE (NOKIA E-7)	12 UNIT	354864042919416 354864044956879 354864044953835 354864042818921	27797 28213 28214 28215	BSSN	2013	02.01/08/2019	02.01/08/2019				
6			8890CE8671395	31195	BSSN	2013	02.01/08/2019	02.01/08/2019				

	MOBILE CRYPTO SMS	12 UNIT	8890CE8671396 8890CE8671397 8890CE8671398 8890CE8671399 8890CE8671400 8890CE8671401 8890CE8671402 8890CE8671403 8890CE8671404 8890CE8671405 8890CE8671406	31196 31197 31198 31199 31200 31201 31202 31203 31204 31205 31206								
7.	JAMMER HPRC 6 BAND	2 UNIT	3402 3403	34663 34664		BSSN	2014	28 Agustus 2019	Baik	SO	TG	

Mataram, 30 September 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Dr. Najamuddin Ammy, S.Sos, M.H.

NIP. 19750112199603 1 006

LAMPIRAN IV

DAFTAR KUNCI SISTEM SANDI
DI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KUNCI SISTEM SANDI												
NO	PALSAN	MANUAL KEY			PRODUKSI		NOMOR	TGL	MASA BERLAKU			KET
		NAMA BUKU	NO.KUNCI	JML	PRODUSEN	THN			BB	SB	TB	
1.	- OTP Operasional	Anyam	AA1040118	1	BSSN	2018	BA.459/BSSN/D2/PP.01.01/10/2018	01/10/2018	1 Tahun	-		Tahun 2018
	- OTP Cadangan	Bincang	AA1040216	1	BSSN	2018	BA.459/BSSN/D2/PP.01.01/10/2018	01/10/2018	1 Tahun			Tahun 2018
	- OTP Cadangan	Aura	AA11401118	1	BSSN	2018	BA.459/BSSN/D2/PP.01.01/10/2018	01/10/2018	1 Tahun			Tahun 2018
2.	Kunci Sisan Kriptosoft PC Password	Cryptosoft Pro	3319	1	BSSN	2011	R Perj 53/BSSN/KH.02.01/08/2019	01/08/2019				Tahun 2011

Mataram, 30 September 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Dr. Najamuddin Ammy, S.Sos, M.H.

NIP.19750112199603 1 006

LAMPIRAN V

DAFTAR PERALATAN SANDI DAN APU
DI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	NAMA APU	NOMOR SERI	NUP	JML	POSISI	PENGADAAN		BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)		KONDISI (B/R)	PENGUNAAN (AG/TG)	KET
						INSTANSI	THN	NOMOR	TGL			
1.	Jammer HPRC Band 6	3402 3403	34663 34663	2 unit	Kasa Diskominfo	-	-	R Perj 53/BSSN/KH.02.01/08/2019	28 Agustus	B	AG	Berfungsi baik

Mataram, 30 September 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik


Dr. Najamuddin Ammy, S.Sos, M.M.

NIP. 19750112199603 1 006

LAMPIRAN VI

**DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK
DI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

No	Nama Sistem Elektronik	Kategori Sistem Elektronik (Strategis/Tinggi/ Rendah)	Pengelola Sistem Elektronik	Bentuk Pengamanan Minimal yang sudah terpasang*	Uji Keamanan Sistem Elektronik		Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Uji (dalam bentuk persentase)		
					Pelaksana	Tahun	Tela	Sedang	Belum
1	Penerapan Layanan Email Sanapati	Strategis	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo NTB	Penggunaan Antivirus, Sistem <i>firewall</i> oleh BSSN	BSSN	Sudah diterapkan sejak 2015	100%	-	-
2	Penerapan Layanan Sistem Sertifikat Elektronik	Strategis	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo NTB	Pengamanan sistem <i>firewall</i> oleh BsRE-BSSN	BsRE	Dalam proses penerapan/ implementasi	-	70%	-
3	Layanan NTB Care	Strategis	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo NTB	Sistem pengamanan <i>firewall</i> intern bidang PTIK	Internal Bidang PTIK Diskominfo NTB	Sudah diterapkan sejak awal 2019	100%	-	-

Mataram, 30 September 2021

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik


Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, M.M.
NIP.19750112199603 1 006

LAMPIRAN VII

DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN
DI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SUBBAGIAN ARSIP DAN EKSPEDISI BIRO UMUM

1. Ketersediaan Prosedur Pengelolaan Dokumen

No	Prosedur	Ketersediaan		Identitas Prosedur	Tahun Terbit	Tahun Terakhir Revisi
		Ada	Tidak Ada			
1.	Klasifikasi Informasi PPID	✓		Layanan Informasi Berklasifikasi	2019	2020
2.	Jadwal Retensi Arsip		✓			
3.	Pemusnahan Arsip		✓			
4.	Permintaan Informasi/Dokumen	✓		SOP Subbagian Arsip dan Ekspedisi Biro Umum	2012	2018
5.	Distribusi Informasi/Dokumen	✓		SOP Subbagian Arsip dan Ekspedisi Biro Umum	2012	2018

2. Pemusnahan Dokumen

No	Dokumen Yang Dimusnahkan	Berita Acara		Pelaksanaan Pemusnahan
		Nomor Berita Acara	Tanggal	
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-

Mataram, 30 September 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik



Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, M.M.
NIP. 19750112199603 1 006

LAMPIRAN VIII

DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI
DI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	Bentuk Layanan	Tahun	Penerima Layanan		
			Masyarakat*	Pegawai**	Perangkat Daerah***
1.	Pelaksanaan Kegiatan Kontra Penginderaan	2019	-	-	Ruang Kerja Pimpinan (Gubernur, Wagub, Sekda) Sekretariat Daerah Provinsi NTB

Keterangan:

*Dengan menyebutkan kelompok masyarakat, misal sekolah, atau jika masyarakat secara luas, cukup ditulis "Umum"

**Dapat menyebut perangkat daerah dimana pegawai tersebut berdnas, jika keseluruhan pegawai, cukup ditulis "Pegawai Pemda"

***Dengan menyebutkan nama perangkat daerahnya.

Mataram, 30 September 2021

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik


Dr. Naijaddin Amy, S.Sos, M.M.
NIP. 19750112199603 1 006

LAMPIRAN IX

DAFTAR HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
DI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	Nama JKS*	Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terhubung	Media Komunikasi	Peralatan Sandi yang digunakan
1.	Layanan Email Sanapati	Kementrian/Lembaga tingkat pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.	Email	Komputer dengan software email Sanapati BSSN

Keterangan:

*JKS Internal Pemerintah Daerah yang menghubungkan antar perangkat daerah atau JKS Internal Perangkat Daerah yang menghubungkan unit kerja didalam perangkat daerah.

Mataram, 30 September 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik


Dr. Najatuddin Amy, S.Sos, M.M.

NIP.19750112199603 1 006

LAMPIRAN X

DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE/ELEKTRONIK
DI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	Nama Aplikasi Persuratan	Pihak yang terhubung			Bentuk Pengamanan yang sudah terpasang	Media Akses		Jaringan Akses	
		TU Perangkat Daerah	Es 1 dan Es 2	Semua Pejabat		Smartphone	PC/Laptop	Intranet	Internet
1.	Layanan Email Dinas	Seluruh OPD Pemprov NTB		✓	Anti virus, firewall	✓	✓	✓	✓
2.	Layanan Email Sanapati	Bagian Umum Setda Kabupaten/Kota dan Dinas Kominfo NTB		✓	Anti virus, firewall		✓		✓

(Khusus bagi Pemerintah Daerah yang pengelolaan suratnya sudah menggunakan system elektronik , misal e-surat)

Mataram, 30 September 2021

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik


Dr. Naimuddin Amy, S.Sos, M.M.

NIP. 19750112199603 1 006

LAMPIRAN XI

DAFTAR KELENGKAPAN SARANA KERJA
DI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	SaranaPendukung	Jumlah	Kondisi
1	Sarana Kerja Adminisrasi		
	a. Sarana Pengolah Data		
	- Desktop	8 desktop	3 Baik
	- Laptop	2 laptop	1 Rusak
	- Scanner	-	Baik
	b. Sarana Penyimpan Data		
	- Hardisk	-	-
	- Flashdisk	-	-
	- CD	-	-
	- Box File	-	-
	- Brankas	1 unit	Baik
	- Filling Cabinet	1 unit	Baik
	- Lemari	3 lemari	Baik
	c. Sarana Komunikasi		
	- Telepon	-	-
	- Faksimili	-	-
	- Sarana Internet	2 unit	Baik
	- Radio	2 unit	-
	d. Sarana Pencetak		
	- Printer	4 unit	2 baik, 2 rusak
	- Mesin Foto Copy	-	-
	e. Sarana Tulis Menulis		
	- Ballpoint	-	-
	- Pensil	-	-
	- Penghapus	-	-
	- Spidol	-	-
	- BukuKerja	-	-
	- PapanTulis	-	-
	a. Sarana Penghancur Data		
	- Alat Penghancur Kertas	1 unit	Rusak
	- Palu	-	-
	- Sarana Pembakaran	-	-
	- Gunting	2 Unit	Baik
2	Sarana Kerja Kasa		
	- Bahan Sandi	3 OTP	Baik
	- Telepon SLJJ	-	-
	- Faksimili	-	-
	- Sarana Internet	2 Unit	Baik
	- Jaringan Telepon	-	-
3	Sarana Strong Room		
	- Tabung Pemadam Kebakaran	-	-
	- Telepon PABX (antara strong room dan Kasa)	-	-
4	SaranaPendukung		
	- Meja Kerja	15 Unit	Baik
	- Kursi Kerja	20 Unit	Baik
	- Generator Listrik	-	-
	- Penerangan Darurat	-	-
	- Pengatur Suhu	-	-
	- Genset Portable	-	-

	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Sampah - Kalender - Jam dinding 	5 Unit 5 Unit -	Baik Baik -
5	Sarana Pengamanan Fisik a. Pengamanan Akses Kontrol <ul style="list-style-type: none"> - Otentikasi Berbasis Informasi yang Diketahui (Password/PIN) - Otentikasi Berbasis Informasi yang Dimiliki (smart card/token) - Otentikasi Berbasis Informasi yang Natural ada pada Pengguna (finger print, iris scan, voice scan) - Tanda pengenal (ID card) b. Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> - Sensor Pendeteksi Api (fire detector) - Alarm Kebakaran - Automatic Sprinkle System - Tabung Pemadam Api c. Pengamanan Terhadap Bahaya Penyusup <ul style="list-style-type: none"> - Kamera Monitor (CCTV) - Piket Jaga 	1 Unit - - - - - - - 3 Unit 2 Unit (siang,malam)	Baik - - - - - - Baik Baik